

SPMB Bandar Lampung: Merajut Pendidikan yang Inklusif, Solutif, dan Berkeadilan

SPMB Bandar Lampung: Merajut Pendidikan yang Inklusif, Solutif, dan Berkeadilan

Oleh: Erlan Heryanto, S.Pd., M.Pd.

Ketua KNPI Kota Bandar Lampung

Pendidikan merupakan investasi paling strategis dalam membangun peradaban. Di tengah pertumbuhan Kota Bandar Lampung yang semakin dinamis, akses terhadap pendidikan yang adil dan merata menjadi ukuran nyata keberhasilan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. Karena itu, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk menguji sejauh mana negara hadir menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang layak.

Sebagai representasi pemuda dan mitra strategis pemerintah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandar Lampung memandang pelaksanaan SPMB tahun ini menunjukkan sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi. Tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Apresiasi tersebut layak diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang mampu menghadirkan berbagai solusi atas dinamika pelaksanaan SPMB. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Salah satu langkah yang patut mendapat perhatian adalah kebijakan afirmatif bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah

dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi.

Pendidikan yang berkualitas tidak boleh menjadi privilese bagi kelompok tertentu. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membuka kesempatan yang setara bagi setiap anak bangsa. Dalam konteks itulah kebijakan afirmasi memiliki nilai strategis, karena tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Di sisi lain, sistem seleksi berbasis digital memang masih menyisakan tantangan. Keterbatasan daya tampung menyebabkan sebagian calon peserta didik belum berhasil diterima pada tahap seleksi awal. Namun, yang membedakan pelaksanaan SPMB tahun ini adalah hadirnya solusi konkret dari pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan membuka mekanisme penempatan manual atau kanalisasi bagi peserta didik yang belum memperoleh sekolah. Orang tua diminta melapor setelah pengumuman hasil seleksi sehingga pemerintah dapat melakukan penempatan berdasarkan kuota yang masih tersedia.

Mekanisme tersebut dilakukan melalui pemetaan daya tampung sekolah negeri yang masih memiliki kuota, verifikasi dokumen peserta didik, serta distribusi siswa secara proporsional tanpa memberikan pilihan sekolah tertentu. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada proses seleksi semata, melainkan memastikan hak belajar setiap anak tetap terpenuhi.

Pendekatan tersebut mencerminkan pelayanan publik yang adaptif. Pemerintah tidak membiarkan peserta didik kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena terbatasnya daya tampung pada sekolah tertentu.

Di sisi lain, pelaksanaan pelayanan publik yang baik juga

ditentukan oleh keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi. Dalam hal ini, KNPI Kota Bandar Lampung mengapresiasi sikap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Berbagai catatan yang disampaikan Ombudsman, termasuk perlunya penyelarasan petunjuk teknis dengan regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, disikapi secara terbuka. Pemerintah daerah tidak memilih bersikap defensif, melainkan menjadikan masukan tersebut sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pelayanan publik.

Komitmen itu diwujudkan melalui penyelarasan regulasi daerah dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, penyempurnaan Surat Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan SPMB, peningkatan transparansi pengelolaan kuota pada seluruh jalur penerimaan, serta evaluasi internal melalui Inspektorat Kota.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan praktik *good governance*, yakni pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan bersedia melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kritik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sinergi antara kepemimpinan daerah, birokrasi pendidikan, serta lembaga pengawas menjadi modal penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Kebijakan afirmatif, mekanisme penempatan manual, dan keterbukaan terhadap pengawasan menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Bandar Lampung semakin diarahkan menjadi ruang publik yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Kota Bandar Lampung akan terus mengawal sekaligus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan adalah investasi masa depan. Ketika setiap anak memperoleh kesempatan belajar

yang sama, sesungguhnya saat itulah fondasi Kota Bandar Lampung yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sedang dibangun.